

BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS

A. Kajian Kepustakaan Konseptual tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

1. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Islam

Seperti yang telah dijelaskan dalam definisi konsep bahwa pemberdayaan menurut Moh. Ali Aziz, dkk dalam buku *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat* adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.¹

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur –unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*)

¹ Moh. Ali Aziz, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 169

dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.²

Sunyoto Usman dalam Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian.³ Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai *resources* yang dimiliki. Dalam pandangan

Kartasmita dalam Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat mengatakan bahwa memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Sedangkan pemberdayaan menurut Islam lebih lanjut dikatakan oleh Amrullah Ahmad dalam Pengembangan Masyarakat Islam adalah sebuah sistem tindakan yang nyata yang menawarkan alternatif model

² Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2007), h. 75

³ Abu Huraerah, *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2008), h. 87

pemecahan masalah *ummah* dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam.⁴

Secara tegas al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang penempatan dakwah pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kerangka peran dan proses dalam surat al-Ahzab: 45-46

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

Artinya: *Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. (Q,S. al-Ahzab: 45-46)*

Kedua ayat di atas mengisyaratkan sekurang-kurangnya lima peran dakwah:

Pertama: dakwah berperan sebagai *Syahidan*. Dakwah adalah saksi atau bukti ketinggian dan kebenaran ajaran Islam. Khususnya melalui keteladanan yang diperankan oleh pemeluknya.

Kedua: dakwah berperan sebagai *Mubasyiran*. Dakwah adalah fasilitas penggembira bagi mereka yang meyakini kebenarannya. Kita dapat saling memberi kabar gembira sekaligus saling memberikan inspirasi dan solusi dalam menghadapi berbagai masalah hidup.

Ketiga: dakwah berperan sebagai *Nadziran*, sejalan dengan perannya sebagai pemberi kabar gembira, dakwah juga berperan sebagai pemberi peringatan. Ia senantiasa berusaha mengingatkan para pengikut

⁴ Nanih Machendrawati, dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2001),h. 29

Islam untuk tetap konsisten dalam kebajikan dan keadilan sehingga tidak mudah terjebak dalam kesesatan.

Keempat: dakwah sebagai *Daa'iyah ila Allah*. Dakwah adalah panglima dalam memelihara keutuhan umat sekaligus membina kualitas umat sesuai dengan idealisasi peradaban yang dikehendakinya. Proses rekayasa sosial berlangsung dalam keteladanan kepribadian, sehingga ia senantiasa berlangsung dalam proses yang bersahaja, tidak berlebihan, dan kukuh dalam memegang prinsip pesan-pesan dakwah, yakni selalu mengisyaratkan panggilan spiritual untuk tetap menjadi manusia.

Kelima: dakwah berperan sebagai *Siraajun Munira*. Sebagai akumulasi dari peran-peran sebelumnya, dakwah memiliki peran sebagai pemberi cahaya yang menerangi kegelapan sosial atau kegelapan spiritual. Ia menjadi penyejuk ketika umat menghadapi berbagai problema yang tidak pernah berhenti melilit kehidupan manusia.⁵

Sondang P. Siagaan yang dikutip oleh Khoriddin dalam buku *Pembangunan Masyarakat* menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa tujuan:⁶

- a. Keadilan sosial
- b. Kemakmuran merata
- c. Perlakuan yang sama di mata hukum
- d. Kesejahteraan material, mental, dan spiritual
- e. Kebahagiaan untuk sesama

⁵ Asep Saiful Muhtadi dan Agus Ahmad Safe'i, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2003), h. 17-18

⁶ Khoriddin, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 29

f. Ketenteraman dan keamanan

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat.

Paul A. Samuelson dikutip dari Monzer Kahf dalam *Ekonomi Islam*, ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.⁷

M.A. Manan⁸ dikutip oleh Bustanuddin Agus dalam *Islam dan Ekonomi*, mengatakan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami nilai-nilai Islam. Abdullah al-‘Arabi⁹ mendefinisikan ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur’an dan sunnah yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi. Dari kutipan definisi yang dikemukakan para ahli, Testru¹⁰ menyimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah bentuk pengetahuan yang berkaitan dengan pemecahan masalah ekonomi dengan menjadikan prinsip-prinsip dasar syari’ah Islam sebagai kerangkanya. Di sisi lain

⁷ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 2

⁸ Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi: Suatu tinjauan Sosiologi Agama*, (Padang: Andalas University Press, 2006), h. 41

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

tidak menutup diri terhadap segala perubahan-perubahan, walau dari ekonom non-muslim sekalipun.¹¹

Ekonomi Islam adalah sebuah kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi dan konsumsi atau kenyataan dan permasalahan ekonomi yang dituntun oleh nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip syari'at Islam.¹²

Definisi tersebut menekankan pada nilai-nilai islami dan bahwa ilmu ekonomi Islam membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial (*hablun min-an-nas*). Definisi ini memeberikan implikasi bahwa ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial Islam yang tidak terpisah dari dari nilai-nilai Islam lainnya (*hablun min Allah*). Pada definisi inidengan jelas disebutkan bahwa ekonomi Islam harus bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan demikian, bangunan ekonomi tidak terpisah dari ajaran Islam yang integral (*mutakamil*). Definisi ini juga mengandung suatu koreksian terhadap definisi ilmu ekonomi yang memisahkan antara kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai moral.

Penafsiran masalah ekonomi dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam secara integral, misalnya apabila kita ingin mengetahui pandangan Islam terhadap politik ekonomi atau kajian filsafat sejarah materi, maka semua masalah tersebut harus dikaji berdasarkan aliran yang dianut oleh Islam karena bagaimanapun juga setiap kebudayaan mempunyai konsep terhadap alam. Konsep yang

¹¹ Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi: Suatu tinjauan Sosiologi Agama*, (Padang: Andalas University Press, 2006), h. 41

¹² Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan...*, h. 7

dimiliki oleh suatu kebudayaanlah yang akan menentukan cara berpikir dan bekerjanya, atau seperti yang dikatakan oleh Umer Chapra bahwa setiap masyarakat atau sistem ekonomi pasti didominasi oleh pandangan dunianya sendiri yang didasarkan pada sejumlah kepercayaan, baik itu implisit maupun eksplisit mengenai asal muasal alam semesta dan hakikat renungan manusia tentang semua subjek sebagaimana yang dikatakan oleh Arthur Lovejoy.¹³ Oleh karena itu, ekonomi Islam sebagai suatu kajian yang terletak dalam ajaran Islam secara integral tidak dapat dipisahkan dari aspek aqidah, akhlaq, dan ibadah.

Pemberdayaan ekonomi muslim adalah menjadikan perekonomian masyarakat Islam yang kondisinya lemah (tidak berdaya) menjadi ekonomi yang kuat sehingga bisa menghasilkan produksi yang dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi bisa barang maupun jasa.

Hogan yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam buku *Intervensi Komunitas* menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri atas 5 tahapan utama:¹⁴

- 1) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*);
- 2) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reason for depowerment/empowerment*)

¹³ M. Umar Chapra, *Islam and Economic Challenge*, terj. Ikhwan abiding Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 4-5

¹⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas.....*, h. 85

- 3) Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*Identify one problem or project*)
- 4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*), dan
- 5) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Dalam program “Tebar Zahabat”, pemberdayaan dipandang sebagai sebuah program. Sebagai suatu program, pemberdayaan harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat masyarakat agar dapat lebih pandai dan mampu mengembangkan komunikasi antar mereka sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, ketika si agen pengubah yang berasal dari luar, baik itu dari lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan telah menyelesaikan programnya, pemberdayaan sebagai proses tetap berlangsung pada kelompok sasaran tersebut.

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat “Tebar Zahabat”,; agen pengubah adalah seorang *muzakki* dan *amil* yang biasa disebut fasilitator, yakni memberi fasilitas (kemudahan-kemudahan) bagi masyarakat tanpa menafikan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat (*mustahik*).

Sebagai fasilitator, keberadaan *muzakki* dan *amil* tidak mutlak harus hadir terus-menerus pada suatu sasaran (*mustahik*). Fasilitator lebih

berfungsi untuk membuat agar sasaran (*mustahik*) menjadi lebih mampu untuk mengembangkan dirinya sehingga nantinya bisa mandiri bila sudah tiba masanya program selesai. Mandiri dalam konteks pemberdayaan ekonomi adalah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dengan adanya program ini dapat diharapkan adanya peningkatan penghasilan *mustahiq* sehingga untuk ke depannya bisa menjadi *muzakki*.

Prinsip Ekonomi Islam

Busfi Efriyon dalam Islam dan Ekonomi mengatakan bahwasanya terdapat kesamaan prinsip antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi kerakyatan adalah kekeluargaan, keadilan, pemerataan pendapatan, keseimbangan antara individu dengan masyarakat, dan kerjasama atau jaringan. Sedangkan dalam prinsip ekonomi Islam terdapat prinsip tauhid, halal dan *thayyib* (baik), kerelaan, tolong-menolong, manfaat, dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.¹⁵

Prinsip tauhid memiliki makna bahwa keimanan mempunyai peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Saringan moral bertujuan untuk menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas

¹⁵ Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi: ...*,h. 44

sosial dan menghilangkan atau meminimalisasikan penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut, yang akan meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial. Dengan mengacu kepada aturan Ilahiah, maka setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Dalam ekonomi Islam sumber daya insani yang terpenting.¹⁶

Prinsip *halal* dan *thayyib* memiliki makna bahwa dalam ekonomi Islam utamanya dalam proses konsumsi, umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang *halal*, *thayyib*, dan menghindari hal-hal yang secara tegas diharamkan.¹⁷ *Halal* mengacu pada cara mendapatkan barang-barang yang dikonsumsi, sedangkan *thayyib* mengacu pada pengaruh makanan terhadap jasmani, utamanya pengaruh terhadap kesehatan.

Dalam Fikih Muamalah, Nasrun mengungkap prinsip ekonomi Islam adalah bahwa segala perbuatan manusia, termasuk dalam aktivitas berekonomi, haruslah dilakukan dalam rangka mengabdikan kepada Allah; untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, adil, jujur, saling tolong-menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka; tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan akhlak terpuji dan fungsi manusia sebagai *khalifatullah* di bumi; mendahulukan kepentingan

¹⁶ Suheri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (<http://suherilbs.wordpress.com/ekonomi-mikro/ekonomi-makro/>, diakses 27 Juni 2009)

¹⁷ Wan's, *Halal dan Thayyib Sebuah Implementasi Proses Produksi*, (<http://tribunaeconomia.blogspot.com/>, diakses 27 Juni 2009)

bersama dari kepentingan pribadi; kesamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia; mengharamkan segala yang keji, haram, manipulasi, penipuan, eksploitasi; menghalalkan segala yang baik.

Konsep ekonomi Islam

Konsep, istilah, atau kata-kata kunci yang biasa muncul dalam bidang ekonomi adalah kerja, konsep produksi, harta, dan manajemen. Selanjutnya pembahasan tentang kerja ini akan dibagi kepada pembahasan tentang amal shaleh dan etos kerja dalam Islam.

1) Amal Shaleh

Definisi amal shaleh adalah pekerjaan yang apabila dilakukan tidak menyebabkan dan mengakibatkan kemudharatan, apabila dilakukan akan memperoleh manfaat dan kesesuaian. Dalam konsep materialis, konsep ini tentu dilihat dari mendatangkan keuntungan atau tidak. Jangankan kerja, waktu pun mereka hargai dengan uang. “*Time is Money*”.¹⁸

Pengertian atau konsep tersebut berkonotasi kebaikan duniawi. Istilah *amal* dalam bahasa Arab berarti pekerjaan. Istilah *shalih* berarti kebaikan, juga berkonotasi duniawi. Namun keduanya dalam pengungkapan al-Qur'an dikaitkan dengan iman (*amanuu wa ‘amilusshalihah*). Dengan demikian paduan amal shaleh punya dua dimensi dunia dan akhirat, antara ritual dan sosial. Maka program BPR Syari’ah yang bernama “Tebar Zahabat” memiliki dimensi ritual

¹⁸ Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi*, h.. 76

dan sosial. Keduanya berjalan seimbang antara dimensi dunia dan akhirat. Dikatakan berdimensi ritual dan sosial karena merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kaum dhu'afa, selain itu terdapat nilai tambah yakni membuat *mustahiq* memiliki etos kerja, tidak hidup bermalas-malasan di dunia. Hal ini akhirnya berdampak bagi lingkungan sekitarnya, yang artinya membawa manfaat. Kerja produktif tidak hanya untuk yang bersangkutan saja, tetapi juga untuk bersama. Bermanfaat dan positif jelas lebih luas dari produktif. Produktif agak bersifat material yang dalam ilmu ekonomi dijelaskan sebagai barang dan jasa. Sedangkan bermanfaat selain aspek materi disyaratkan pula membawa kepada ketaatan kepada Allah.

Konsep amal shaleh seperti yang dijelaskan di atas hampir tidak dikenal dalam dunia ekonomi. Tetapi konsep amal shaleh ini sangat perlu diterapkan dalam konsep kerja dan ekonomi Islam karena dengan menerapkannya dalam dunia ekonomi, akan tercipta ekonom-ekonom yang berpandangan ke depan dan berjiwa Islami. Aktivitas di bidang ekonomi tidak bisa lepas dari ibadah, dari melaksanakan tugas sebagai *khalifatullah* serta harus mengandung *masalahah*.

2) Etos Kerja

Etos kerja Islami terpancar dari sistem keimanan yang bertolak dari ajaran wahyu yang bekerjasama dengan akal.¹⁹ Etos

¹⁹ *Ibid*, h. 93

kerja Islami dapat eksis dengan landasan kokoh dan fungsional bila pemahaman pemiliknya bersifat holistik proporsional. Umat pertengahan yang diungkap al-Qur'an bukan berarti mengambil posisi sama jauh dari dua sisi yang berlawanan, seperti akal dan wahyu, tetapi holistik proporsional, yakni tetap mengambil peran menyeluruh akan tetapi sesuai porsi-porsinya. Rasulullah, *khulafa' rasyidin*, ulama Islam zaman klasik, menurut Asifudin²⁰ tidak mungkin menghasilkan karya-karya besar tanpa etos kerja tinggi yang diajarkan oleh Islam. Tugas manusia sebagai hamba dan khalifah Allah harus dijiwai oleh nilai-nilai moralitas dan intelektualitas. Ilmu dan harta adalah dua alat atau sarana yang urgen bagi manusia guna menyelesaikan tugas mereka, baik berupa *hablumminallah* maupun *hablum minannas*.

Program Tebar Zahabat bisa menjadi salah satu contoh bagi pembentukan manusia yang memiliki etos kerja tinggi. Usaha yang keras untuk mencari pakan ternak dan inisiatif-inisiatif alami yang muncul ketika ada permasalahan dalam proses pemeliharaan ternak merupakan perwujudan etos kerja yang didukung intelektualitas sesuai bidangnya. Perwujudan etos kerja yang tinggi tampak pula pada ketekunan dan keuletan para *mustahiq* dalam memelihara ternak agar memberikan hasil yang diharapkan. Kesabaran, keikhlasan dan tanggung jawab juga merupakan perwujudan dari etos kerja yang baik dari para *mustahiq*.

²⁰ *Ibid*

2. Indikator Keberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Schuler, Hashemi dan Riley²¹ mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis.

Tabel berikut merupakan rangkuman tentang indikator keberdayaan.²²

Jenis hubungan kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
Kekuasaan di dalam: Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya - Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara - Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan diri dan kebahagiaan - Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara. - Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Assertiveness</i> dan proses hukum, politik otonomi - Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik.

²¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2005) h. 63

²² *Ibid*, h. 65

		<p>orang lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik.
<p>Kekuasaan untuk: Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Akses terhadap pelayanan keuangan mikro - Akses terhadap pendapatan - Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga. - Akses terhadap pasar - Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan, termasuk kemelekan huruf - Status kesehatan dan gizi - Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi - Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah. - Pengetahuan mengenai dan kebudayaan. - Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintangi akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan.
<p>Kekuasaan atas: Perubahan pada hambatan-hambatan, sumber, dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. - Kontrol atas pendapatan aktifitas produktif keluarga yang lainnya. - Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga. - Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga. - Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga berencana. - Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat - Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik.
<p>Kekuasaan dengan: Meningkatkan solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern - Mampu memberi gaji terhadap orang lain - Tindakan bersama menghadapi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan tinggi dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga - Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis. - Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat. - Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender

dan makro	diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro		yang bersifat kultural, politis hukum pada tingkat masyarakat dan makro.
-----------	---	--	--

3. Konsep Zakat Produktif

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan yang mengeluarkan zakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat.²³

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, bersyukur nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahiq* maka zakat berfungsi menolong dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak

²³ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82

Menurut K.H. Didin Hafidhuddin, zakat yang disalurkan kepada golongan ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usaha mereka.²⁴

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rosulullah dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim²⁵ dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rosulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Dalam kaitan dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi²⁶, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu *Fiqh Zakat*, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Menurut Didin Hafidhuddin, BAZ ataupun LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam....*, h. 133

²⁵ Ismail al-Kahlani as-Shan'anni, *Subulus Salam*, (Bndung: Dahlan,....), Juz II, h. 149

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), Juz II, h. 567

pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahik* dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.²⁷

Zakat produktif dalam PT. BPR Syari'ah memakai sistem penyaluran berantai, yakni penyaluran binatang ternak dari satu *mustahiq* ke *mustahiq* lainnya. Sistem ini berawal dari diberikannya 2 induk ternak dalam hal ini kambing dalam keadaan bunting kepada *mustahik* untuk dikembangbiakkan, setelah beranak selama 2 (dua) kali maka dikembalikan ke pihak bank yang dalam hal ini berperan sebagai *muzakki*. Oleh pihak bank kambing tersebut diremajakan lagi kemudian diberikan kepada *mustahiq* lain yang membutuhkan. Program Penyaluran Zakat "Tebar Zahabat" yang dilaksanakan oleh BPR Syari'ah Artha Daya Mentari merupakan jenis perwujudan sistem zakat produktif karena dalam penyalurannya *mustahiq* diharuskan untuk mengembangbiakkan ternak hingga beranak dua kali, ini berarti pemberian *muzakki* tidak bersifat konsumtif semata tapi juga bersifat produktif, bahkan bisa menambah pengetahuan *mustahiq* tentang bagaimana cara mendapatkan kualitas ternak yang baik. Selain itu, adanya *sharing* antar *mustahiq* menjadikan

²⁷ *Ibid*, h. 134

hubungan silaturahmi bertambah kuat selain di dalamnya terdapat pula pertukaran pengalaman dan ilmu mengenai beternak kambing.

Selanjutnya dikatakan pula oleh Didin Hafiduddin bahwa zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas sekaligus penguasaan aset-aset umat Islam.²⁸ Program “TEBAR ZAHABAT” ini memberi lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal ini tampak jika pada awalnya *mustahiq* seorang pengangguran maka dengan adanya Program TEBAR ZAHABAT ia akan menghabiskan waktunya untuk merawat ternak, mencari ide-ide baru bagaimana beternak yang baik secara otomatis hal itu akan menambah pengetahuan mereka. Jika sebagian *muzakki* merasa kesulitan dalam perawatan hewan ternak (kambing) maka mereka akan tergerak untuk mencari pengetahuan baru tentang cara berternak dengan jalan bertanya atau dari buku-buku pengetahuan. Di sinilah salah satu tugas seorang *muzakki* dan *'amil* yakni senantiasa memompa semangat *mustahiq* agar tidak hanya pasrah dengan keadaan hewan ternak tapi tetap terus-menerus mencari cara agar ternaknya memiliki kualitas yang baik. Lambat laun tumbuhlah kesadaran dalam diri *mustahiq* untuk memperbaiki kondisi ekonominya, tentunya tetap dengan dukungan *'amil* dan *muzakki* yang secara intensif melakukan pemantauan. Dalam ilmu pemberdayaan masyarakat *'amil* dan *muzakki* disebut pihak fasilitator, yakni memberi fasilitas yakni kemudahan-

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam....*,h. 15

kemudahan bagi masyarakat tanpa menafikan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat (*mustahiq*).

4. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Islam

Bila kita mempelajari literatur manajemen maka pengertian manajemen belum mencapai keseragaman. Istilah manajemen dapat didefinisikan dengan berbagai rumusan tergantung kepada cara pandang pembuat definisi.

Secara garis besar istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua; manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dan ketiga; manajemen sebagai suatu seni (suatu *art*) dan sebagai suatu ilmu.²⁹

Menurut pengertian pertama, yakni manajemen sebagai suatu proses, berbeda-beda definisi yang diberikan oleh para ahli. Untuk memperlihatkan tata warna definisi manajemen menurut pengertian pertama, maka telah ditemukan tiga buah definisi.³⁰

1. Dalam *Encyclopedia of the Social Sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.

²⁹ Drs. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), h. 15

³⁰ *Ibid*, h. 16

2. Manajemen menurut Haimann adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama
3. George R.Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain.

Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen, dalam arti singular (tunggal), disebut manajer yakni orang yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain.³¹

Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau suatu ilmu. Mengenai ini pun belum ada keseragaman pendapat. Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena (gejala-gejala), kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan seni manajemen menghendaki kreativitas, atas dasar dan dengan syarat

³¹ *Ibid*

suatu pengertian mengenai ilmu manajemen. Maka dari itu, ilmu pengetahuan dan seni manajemen merupakan komplementernya masing-masing. Kalau yang satu meningkat, demikian pulalah harusnya yang lain; perlu ada suatu keseimbangan antara keduanya.³²

Memperhatikan ketiga definisi tersebut maka Manullang memberi definisi manajemen sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.³³

Manajemen adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan selaras dengan semua definisi tentang manajemen yang dikemukakan para pakar, biasanya orang mengungkapkan bahwa esensi manajemen adalah proses integrasi dan koordinasi.³⁴

Sarana manajemen

Untuk mencapai suatu tujuan maka manajer menggunakan sarana (tools) atau alat manajemen antara lain: *man, money, material*,

³² George. R. Terry dan L.W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, Terjemahan oleh G. A. Ticoalu, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2

³⁴ Nanih Machendrawati, dkk, *Pengembangan Masyarakat*, h. 136

methods dan *markets*,_Kesemuanya itulah yang disebut dengan sumber daya.³⁵

Sarana penting atau sarana utama dari setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah *man* atau manusia. Berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan aktivitas itu dapat kita tinjau dari sudut proses seperti: *planning, organizing, staffing, directing dan controlling*. Untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut kita perlukan manusia. Tanpa adanya manusia, manajer tidak mungkin mencapai tujuannya. Harus diingat bahwa manajer adalah orang yang mencapai hasil melalui orang-orang lain. Begitu pula dengan program penyaluran zakat “Tebar Zahabat”, direktur tidak mungkin bisa bekerja sendiri untuk melaksanakan program tersebut. Hal yang keberadaannya sama penting adalah peran orang-orang di belakang direktur, yakni yang berkompeten dalam bidang pemberdayaan. Orang-orang yang memiliki jiwa sosial tinggi sehingga benar-benar bisa melakukan tugas sebagai abdi masyarakat.

Sarana manajemen kedua adalah uang. Untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang, seperti upah atau gaji orang-orang yang membuat rencana mengadakan pengawasan, dan lain sebagainya. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa

³⁵ Drs. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, h. 17-18

agar tujuan yang ingin dicapai bila dinilai dengan uang lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kegagalan atau ketidاكلancaran proses manajemen sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan atau ketelitian dalam penggunaan uang.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan, karenanya dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Demikian pula dalam proses pelaksanaan kegiatan, terlebih dalam kemajuan teknologi dewasa ini manusia bukan lagi sebagai pembantu bagi mesin seperti terlihat pada masa sebelum revolusi industri malahan telah terjadi sebaliknya, mesin berubah kedudukannya malahan sebagai pembantu bagi manusia.

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya dan berhasil guna maka manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif metode atau cara melakukan pekerjaan. Oleh karena itu metode atau cara dianggap pula sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. Metode atau cara yang dipakai oleh PT BPR Syari'ah dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah bekerja sama dengan ta'mir masjid di daerah yang kemudian bertugas menjadi pengontrol atau pengawas daerah di tempat amil tinggal. Di sini amil berkedudukan sebagai fasilitator, bukan seseorang yang lebih pandai atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari

masyarakat. Fasilitator diambil dari masyarakat sendiri karena masyarakat yang lebih paham kondisi sosial ekonomi daerahnya bukan orang di luar mereka, pejabat tertinggi sekalipun.

Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut Harold Koontz, Cyril O'donnel, dan William Herbert Newman³⁶ dalam dasar-dasar manajemen, bila dilihat dari proses atau urutan pelaksanaan aktivitas manajemen, fungsi-fungsi manajemen ialah: perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan.

Kelima fungsi manajemen itu merupakan suatu hal yang berulang-ulang (siklus) maka kelima fungsi itu selain disebut sebagai aspek-aspek manajemen atau unsur-unsur manajemen disebut juga proses manajemen.

George. R. Terry dan L.W. Rue dalam dasar-dasar manajemen menjelaskan tentang lima fungsi manajemen:³⁷

1. *Planning*: menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

³⁶ *Ibid*, h. 24-26

³⁷ George. R. Terry dan L.W. Rue, *Dasar-dasar.....*, h. 9-10

2. *Organizing*: mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3. *Staffing*: menentukan keperluan sumber-sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja.
4. *Motivating*: mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan.
5. *Controlling*: mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif.

Fungsi-fungsi dasar manajemen adalah saling berkaitan. Perencanaan umpamanya mempengaruhi pengorganisasian, dan pengorganisasian mempengaruhi pengawasan. Satu fungsi sama sekali tidak berhenti, sebelum yang lain dimulai. Fungsi-fungsi itu jalin-menjalin tak terpisahkan.

Terdapat dua jenis fungsi manajer, yakni fungsi ke dalam dan ke luar perusahaan. Sering disebut *internal function of a manager* dan *external function of a manager*. Fungsi manajer ke dalam perusahaan dapat dilihat dari sudut:

1. Proses yakni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan.

2. Subyek atau bidang yaitu keuangan, personalia, pemasaran, pembelian produksi, dan sebagainya.

Adapun fungsi manajer keluar perusahaan ada tiga jenis:

1. Mewakili perusahaan di bidang pengadilan
2. Mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa
3. Mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat.

Kedua macam fungsi manajer yang pertama yang tertuju ke luar perusahaan, kiranya sudah cukup jelas. Fungsi ketiga perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Setiap perusahaan tidak berdiri sendiri, ia memerlukan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Baik tidaknya hubungan sesuatu perusahaan dengan unsur-unsur masyarakat, memegang peranan penting dalam berhasil tidaknya seorang manajer untuk merealisasikan tujuan.

Adapun tujuan manajemen dalam Islam tidak berbeda dengan tujuan yang ingin diwujudkan oleh masyarakat Muslim, yang bermuara untuk beribadah kepada Allah, yang tercermin dalam:³⁸

- Menerapkan syaria't Islam dalam beribadah, muamalah dan hukum.

³⁸ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2006), h 250

- Memakmurkan bumi yang diwajibkan Allah kepada hamba-Nya , yang menuntut pencerahan upaya materi, intelektual untuk memanfaatkan kekayaan daratan dan lautan. Menegakkan kekhalifahan (kepemimpinan) Allah di muka bumi yang direfleksikan dengan menegakkan hukum, pemerintahan yang adil dan mengatur hubungan di antara anggota masyarakat.
- Membentuk masyarakat dan negara Islam yang adil dan sejahtera, masyarakat yang memiliki ruh untuk beribadah kepada Allah dengan benar.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat Islam adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memberi daya (kuasa) terhadap masyarakat dengan menggunakan sistem-sistem/syari'at Islam.

Dasar pengembangan manajemen berdasarkan Islam, walaupun sifatnya gradual dan lebih bersifat hipotesis (namun profetik), didasarkan pada sasaran akhir yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut :³⁹

1. Sikap mandiri yang berdasarkan keyakinan akan kemampuan diri (*self-confidence*) yang mendalam dan *istiqamah* yang tumbuh karena penalaran dan penghayatan intelektual dari pengalaman akan Yang Maha Esa (bertauhid).
2. Kebebasan berkomunikasi.

³⁹ Nanih Machendrawati, dkk, *Pengembangan Masyarakat.....*,h. 143

3. Pengendalian pada kebijaksanaan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul.
4. Pembinaan pengaruh hendaklah didasarkan pada keandalan ilmu pengetahuan teknis, bukan pada kekuasaan dan egoisme seseorang.
5. Kemampuan untuk menyalurkan setiap konflik menjadi suatu persaingan yang sehat dan positif, berdasarkan asas *musabaqah lilkhairat*.

5. Dasar-Dasar Penyaluran Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, yang disalurkan kepada para *mustahiq* harus sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun program kerjanya. Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, terutama golongan fakir-miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.⁴⁰

Secara umum penyaluran zakat dapat terbagi menjadi:⁴¹

- a. Penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, penyalurannya dapat dilakukan langsung diserahkan pada pihak yang berhak menerima zakat.
- b. Penyaluran zakat yang bersifat produktif, penyalurannya mengandung aspek sosial ekonomi yang sangat luas.

⁴⁰ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Seleka Hukum Islam*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 235

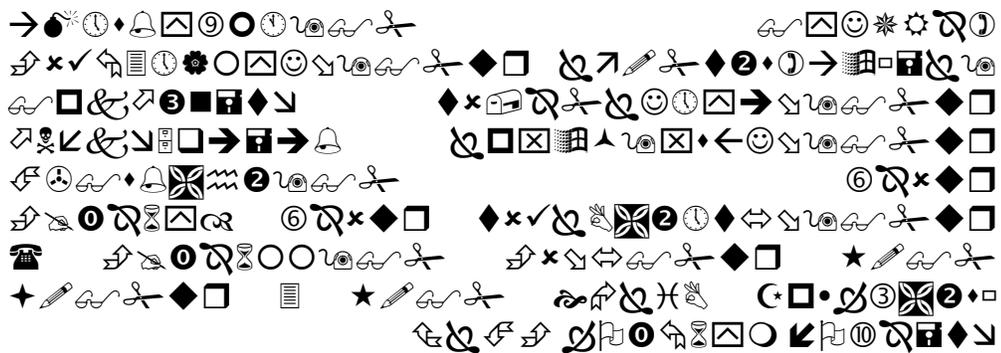
⁴¹ Ridwan Mas'ud, *Zakat dan*, h. 102

Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan antara lain dalam surah al-Baqarah: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَارَبَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya: *(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.(Q.S. al-Baqarah: 273).*

Adapun zakat diperuntukkan bagi 8 (delapan) golongan seperti dinyatakan dalam surah al-Taubah ayat 60:



Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Taubah: 60)⁴²

⁴² Departemen agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha Putra,

Makna yang dapat kita ambil dari nash di atas adalah sebuah gambaran sistem penyaluran zakat yang bersifat konsumtif karena digunakan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari. Selain itu bisa juga bersifat produktif yakni sebagai modal usaha.

B. Teori Manajemen Islam

Manajemen Islam mengakui kontribusi anggota organisasi, menghormati anak cucu Adam, dan menjaga kemuliaannya. Hal ini bersinggungan dengan fungsi kepemimpinan dalam manajemen. Dengan manajemen yang baik maka akan baik pula hasil yang dicapai, berlaku pula sebaliknya. Ali bin Thalib r.a. menggambarkan betapa kebatilan yang diorganisir dengan rapi akan mengalahkan kebaikan yang tidak diorganisir.

الحق بلا نظام يغلبه الباطل بنظام

*“Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi dengan rapi”.*⁴³

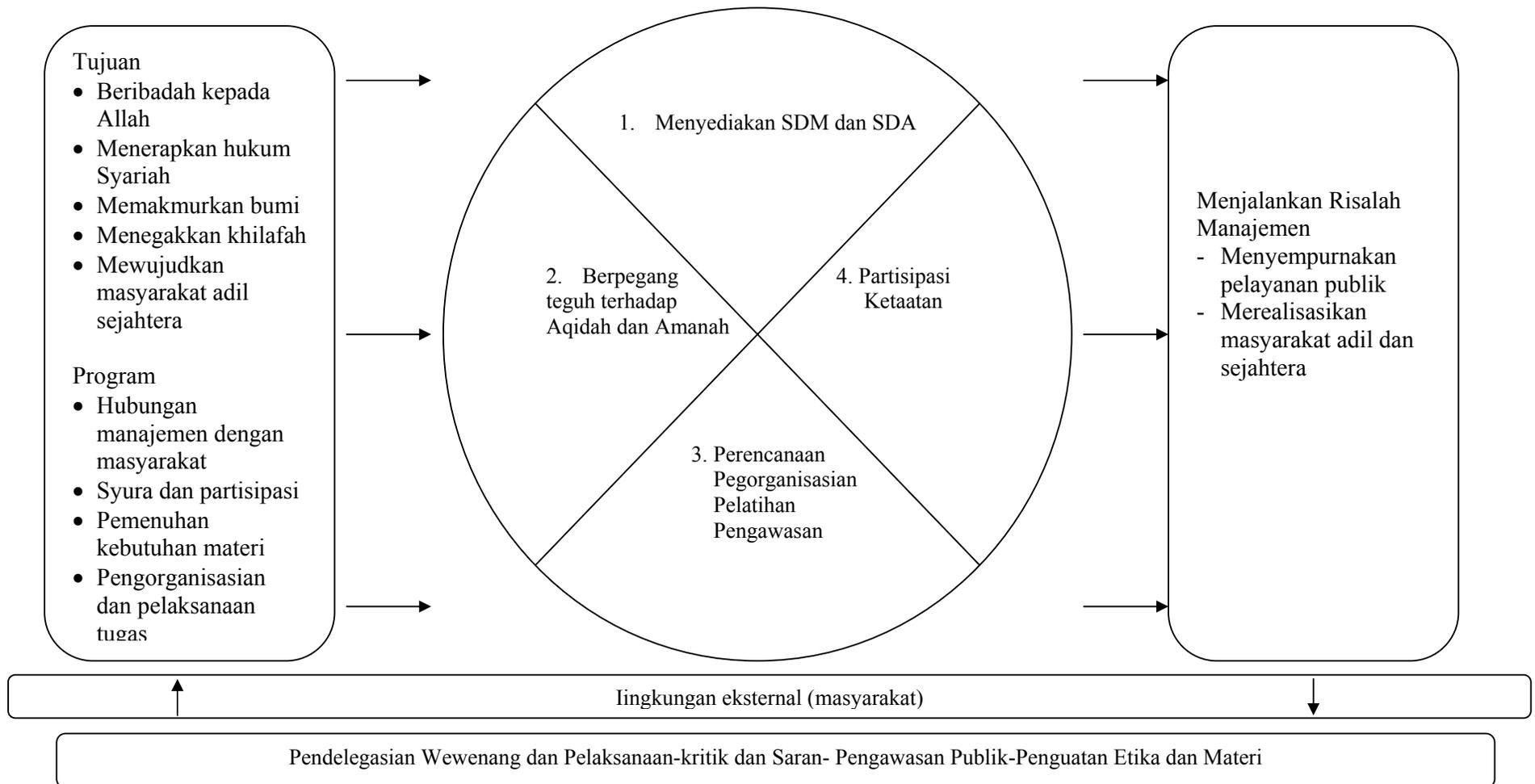
Ahmad Ibrahim Abu Sinn⁴⁴ memberi gambaran tentang teori manajemen Islam yang merupakan kumpulan pendapat dan pemikiran, serta kesatuan masyarakat yang akan menjadi amunisi bagi sistem manajemen melalui sebuah bagan sebagai berikut:

1996), h. 288

⁴³ Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syri'ah: dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 4

⁴⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah.....*, h. 252

DIAGRAM TEORI MANAJEMEN ISLAM



Teori manajemen Islam terdiri atas input, proses manajemen dan output. Berinteraksi dengan kondisi eksternal, sehingga bisa menjalankan peran kehidupan, sehingga Allah memberikan keberkahan di muka bumi.

Input dalam proses manajemen ini dicerminkan dengan bahan baku atau unsur pokok untuk menjalankan aktivitas manajemen, yakni tujuan dan program manajemen. Tujuan manajemen seperti yang telah dipaparkan sebelumnya yakni:

- Menerapkan syari'at Islam dalam beribadah, muamalah dan hukum.
- Memakmurkan bumi yang diwajibkan Allah kepada hamba-Nya , yang menuntut pencerahan upaya materi, intelektual untuk memanfaatkan kekayaan daratan dan lautan. Menegakkan kekhalifahan (kepemimpinan) Allah di muka bumi yang direfleksikan dengan menegakkan hukum, pemerintahan yang adil dan mengatur hubungan di antara anggota masyarakat.
- Membentuk masyarakat dan negara Islam yang adil dan sejahtera, masyarakat yang memiliki ruh untuk beribadah kepada Allah dengan benar.

Sedangkan input yang berupa program, maka dalam pembuatan program tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Keterkaitan manajemen dengan lingkungan sosial yang berpegang teguh pada nilai-nilai syari'ah (variabel sosial)
- Menerapkan konsep syura dan mengakui partisipasi masyarakat dalam manajemen, menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang mendorong pegawai melakukan kinerja optimal mereka merasa diakui kehadiran dan kemuliaan kemanusiaannya (variabel kemanusiaan).
- Menyempurnakan pilar-pilar ekonomi dan kebutuhan materi yang bersifat pokok bagi masyarakat. Memperhatikan kebutuhan pokok dan kesejahteraan pegawai, tidak melakukan eksploitasi dan tindak kezaliman bagi mereka (variabel ekonomi).
- Menjalankan fungsi pengorganisasian dalam manajemen menentukan wewenang dan tanggung jawab, menghormati kekuasaan resmi, taat kepada pimpinan atas kebaikan, menjalankan keputusan manajemen tanpa berlebih-lebihan (variabel pengorganisasian dan menghormati kekuasaan syari'ah).

Sedangkan proses manajemen dalam bagan di atas digambarkan dalam satu lingkaran dalam empat bagian terdiri atas variabel yang saling bertalian satu dengan lainnya, sehingga akan menghasilkan interaksi yang dinamis dalam sebuah manajemen. Variabel yang dimaksud adalah:

- Menyediakan dan menyempurnakan sumber daya manusia atau materi yang mendukung (kekuatan).
- Anggota masyarakat konsen dan berpegang teguh pada nilai-nilai aqidah (amanah) dengan melakukan pengawasan dan pengembangan spiritual mereka.
- Menyempurnakan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pelaksanaan, pengawasan dan audit terhadap kinerja pekerja.
- Adanya partisipasi pegawai dan masyarakat secara intens, dan ketaatan terhadap atasan dengan penuh kerelaan.

Jika input telah diproses dalam manajemen, dan terjadi interaksi yang intens dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan manajemen, maka akan menghasilkan output sebagai berikut:

- Sempurnanya pelayanan pokok bagi masyarakat publik Islam
- Terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera, jauh dari tindak kekufuran, kezaliman, penyakit dan kebodohan.

Dasar pengembangan manajemen berdasarkan Islam, seperti dalam paparan sebelumnya didasarkan pada sasaran akhir yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut :⁴⁵

⁴⁵ Nanih Machendrawati, dkk, *Pengembangan Masyarakat.....*,h. 143

6. Sikap mandiri yang berdasarkan keyakinan akan kemampuan diri (*self-confidence*) yang mendalam dan *istiqamah* yang tumbuh karena penalaran dan penghayatan intelektual dari pengalaman akan Yang Maha Esa (bertauhid).
7. Kebebasan berkomunikasi.
8. Pengendalian pada kebijaksanaan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul.
9. Pembinaan pengaruh hendaklah didasarkan pada keandalan oln\mu pengetahuan teknis, bukan pada kekuasaan dan egoisme seseorang.
10. Kemampuan untuk menyalurkan setiap konflik menjadi suatu persaingan yang sehat dan positif, berdasarkan asas *musabaqah lilkhairat*.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa judul penelitian ini menunjuk pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat PT. BPR Syari'ah yang diberi nama "TEBAR ZAHABAT". Dalam melakukan kajian kepustakaan penelitian telah ditemukan beberapa penelitian yang sealiran dan sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan ini. Penelitian tersebut antara lain:

1. Judul penelitian: Peran BAZ (Badan Ami Zakat) Propinsi Jawa Timur dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kecil Menengah di Wilayah Surabaya.

Penelitian di atas menjelaskan bagaimana peran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dalam memberdayakan ekonomi kelompok usaha kecil menengah melalui program pendampingan dengan bantuan dana bergulir. Pendampingan antara lain diberikan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan berwirausaha, pelatihan manajemen dan pengelolaan usaha mandiri.

2. Judul Penelitian: Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Baitul Mal Hidayatullah Surabaya dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.

Penelitian di atas menjelaskan bagaimana manajemen pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Upaya-upaya tersebut antara lain menerima limbah barang bekas, beasiswa ikatan dinas, beasiswa SMP, SMU Luqmanul Hakim, dan BMH Peduli Bencana.